
Peran Perbankan Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan

Ferdi Pratama

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Email: tjawhead@gmail.com

Muhammad Subhan

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Email: muhammadsubhan@uinjambi.ac.id

Korespondensi penulis: *tjawhead@gmail.com

Abstract: This study aimed to analyze the role of Islamic banks in implementing financial inclusion in Indonesia. Financial inclusion is a process to provide formal financial access for the poor and low income people (unbankable people). This study was designed which approached qualitatively and quantitatively (mixed research). The qualitative data analyzed by using Straruss and Corbin's theory consisted three major steps: open coding, axial coding, and selective coding. Quantitative analyzed by using comparative analysis of financial statements and financial ratio analysis such as CAR, ROA, ROE, NPF, and FDR period of 2010-2014. This study proved that Islamic banking had great potential in implementing financial inclusion, it was indicated by a significant increase in funding and financing since 2010-2014 and results of financial ratio analysis also shows the performance of Islamic banking and financial condition is good.

Keywords: Islamic Banks; Financial Inclusion; Financial Exclusion.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perbankan syariah dalam mengimplementasikan financial inclusion di Indonesia. Financial inclusion merupakan proses untuk memberikan akses keuangan formal bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah (unbankable people). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (mixed research). Analisis data kualitatif menggunakan teknik analisis yang dikembangkan oleh Straruss dan Corbin dengan tiga langkah besar, yaitu open coding, axial coding, dan selective coding. Analisis data kuantitatif menggunakan analisis perbandingan laporan keuangan pada tahun 2010-2014 dan analisis rasio keuangan berupa CAR, ROA, ROE, NPF, dan FDR. Penelitian ini membuktikan bahwa perbankan syariah memiliki potensi besar dalam mengimplementasikan financial inclusion, ditunjukkan dengan pertumbuhan yang signifikan pada funding dan financing tahun 2010-2014 dan hasil analisis rasio keuangan juga menunjukkan kinerja dan kondisi keuangan perbankan syariah baik.

Kata Kunci: Perbankan Syariah; Keuangan Inklusif; Keuangan Eksklusif

1. PENDAHULUAN

Krisis keuangan global yang terjadi tahun 1998, krisis tahun 2008, dan krisis di Eropa tahun 2011, telah membuat industri perbankan Eropa anjlok. Keadaan perekonomian ini membuat kekuatan perekonomian dunia beralih dari Barat ke Timur, khususnya Asia. Saat terjadinya krisis ini, beberapa negara di Asia justru mengalami pertumbuhan.

Jhong Wha Lee (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa negara berkembang di Asia tumbuh pesat selama tiga dekade terakhir terutama karena pertumbuhan yang kuat pada akumulasi modal yang mencapai 6,01 persen pada tahun 2012 dan 6,6 persen pada tahun 2013. Cina, India, dan Indonesia tetap bisa mempertahankan pertumbuhannya masing-masing dengan kekuatan konsumsi

domestik. Salah satu faktor tingginya tingkat konsumsi yang terjadi di Cina, India, dan Indonesia adalah jumlah populasi negara tersebut hampir setengah dari penduduk di dunia, yaitu sekitar 2,8 miliar penduduk atau sekitar 40 persen dari jumlah penduduk dunia.

Xiaoqiang Cheng dan Hans Degryse (2010) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi salah satunya didukung oleh sektor keuangan, baik perbankan maupun non-bank. Pembangunan sektor perbankan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa pelayanan perbankan seperti pemberian kredit bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Asia ternyata belum didukung oleh akses masyarakat terhadap lembaga keuangan. Akses masyarakat Indonesia terhadap lembaga keuangan juga masih rendah. Berdasarkan data dari World Bank, Global Financial Inclusion Index (2011) memaparkan bahwa Financial Inclusion Index Indonesia hanya 19.6 persen. Ini masih jauh di bawah negara-negara lain seperti Malaysia 66.7 persen, Philipina 26.5 persen, Thailand 77.7 persen, Vietnam 21.4 persen, India 35.2 persen, China 63.8 persen, Rusia 48.2 persen, dan Brazil 55.9 persen.

Masyarakat memiliki hambatan dalam mengakses lembaga keuangan. Tingginya *unbankable people* disebabkan karena gap kemiskinan antar provinsi, rendahnya pembiayaan UMKM, suku bunga kredit mikro tinggi, asymmetric information, kemampuan manajemen UMKM kurang memadai, monopoli bank pada sektor mikro, dan terbatasnya saluran distribusi jasa keuangan. Inilah yang menjadi alasan urgennya pengimplementasian financial inclusion.

Pada KTT Pittsburgh bulan September 2009, para pemimpin G20 berkomitmen untuk meningkatkan akses pelayanan keuangan bagi masyarakat miskin. Disini diluncurkan G20 Financial Inclusion Experts Group (FIEG) dan juga menyepakati model Small and Medium Sized Enterprise (SME) untuk mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan, serta memperkuat regulasi financial inclusion dan perlindungan konsumen. Pada KTT Toronto bulan Juni 2010, para pemimpin G20 menegaskan kembali komitmen mereka untuk meningkatkan akses layanan keuangan bagi masyarakat miskin dan meluncurkan G20 SME finance challenge. Pada KTT Toronto sektor swasta juga dihimbau ikut andil dalam mewujudkan financial inclusion. Para pemimpin G20 juga mendukung satu prinsip Inklusi Keuangan Inovatif, yang bertujuan untuk membentuk landasan dan rencana aksi pragmatis untuk meningkatkan akses layanan keuangan bagi masyarakat miskin. Hasil kesepakatan dalam KTT negara G-20 menetapkan financial inclusion

sebagai pilar penting dalam pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di negara-negara anggotanya. Negara yang memiliki masalah terkait kemiskinan berupaya untuk menciptakan sistem keuangan yang inklusif. Hal ini menjadikan financial inclusion salah satu fokus pembangunan pada sektor keuangan di berbagai negara, karena sistem keuangan yang baik dapat mendorong pertumbuhan dan mengurangi kemiskinan.

Kamalesh Shailesh C. Chakrobarty (2011) mengatakan financial inclusion mempromosikan penghematan dan mengembangkan budaya menabung, meningkatkan akses kredit, baik kewirausahaan maupun konsumsi dan juga memungkinkan mekanisme pembayaran yang efisien, sehingga memperkuat basis sumber daya lembaga keuangan yang mampu memberikan manfaat ekonomi sebagai sumber daya dan tersedianya mekanisme pembayaran yang efisien dan alokatif. Bukti empiris menunjukkan bahwa negara-negara dengan populasi penduduk yang besar, belum mempunyai akses yang luas terhadap sektor formal lembaga keuangan dan juga menunjukkan rasio kemiskinan yang lebih tinggi dan ketimpangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, financial inclusion hari ini bukanlah merupakan pilihan, tetapi menjadi sebuah keharusan dan perbankan merupakan pendorong utama untuk implementasi financial inclusion.

Financial inclusion di Indonesia baru di luncurkan pada tahun 2010. Bank Indonesia meluncurkan program National Strategy for Financial Inclusion (NSFI) sebagai upaya untuk memperluas akses masyarakat terhadap jasa keuangan. Selama ini, 32% atau 76 juta penduduk sama sekali belum tersentuh jasa keuangan (financial exclusion). Selain itu, 60-70% Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga belum memiliki akses terhadap perbankan. Padahal hampir 53 juta masyarakat miskin yang bekerja di sektor UMKM memiliki potensi yang sangat besar untuk menurunkan pengangguran dan mengurangi kemiskinan.

Implementasi financial inclusion di Indonesia sudah dilakukan dalam berbagai bentuk seperti pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pengembangan BMT (Baitul Mal wa al-tamwil). KUR adalah skema kredit usaha khusus bagi UMKM dan koperasi yang telah memenuhi standar kelayakan usaha namun tidak memiliki agunan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan. Melalui program KUR pemerintah berupaya meningkatkan akses UMKM kepada kredit usaha dari perbankan dengan cara meningkatkan kapasitas perusahaan penjamin.

Program KUR secara resmi diluncurkan pada 5 november 2007. Peluncuran tersebut merupakan tindak lanjut penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara pemerintah dan dunia perbankan pada 9 Oktober 2007 tentang penjaminan

kredit/pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi. Terdapat tiga pilar utama dalam pelaksanaan program KUR, yaitu: (1) Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini mendorong, membantu, dan mendukung penyaluran dan penjaminan kredit; (2) Lembaga Penjamin. Bertindak sebagai wakil pemerintah dan menjadi penjamin atas kredit yang disalurkan oleh perbankan; (3) Perbankan. Institusi perbankan bertindak selaku lembaga penerima jaminan, yang menyalurkan kredit kepada UMKM dan koperasi dengan menggunakan dana internal masing-masing.

Penelitian Otoritas Jasa keuangan (OJK) tahun 2013 melalui survei di 20 provinsi dengan 8.000 responden, mengungkap relatif rendahnya literasi (pemahaman) keuangan masyarakat Indonesia. Kondisi ini sejalan dengan rendahnya tingkat inklusi keuangan warga. Dalam hal literasi, tingkat pemahaman masyarakat atas perbankan sekitar 22 persen, jasa asuransi 18 persen, pegadaian 15 persen, lembaga pembiayaan 7 persen, dan pasar modal 4 persen. Hasil-hasil ini mengandung pesan bahwa tidak ada pilihan lain bagi bangsa Indonesia kecuali membuat program dan kebijakan untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat miskin, yakni program dan kebijakan yang dapat menjadi solusi bagi rumah tangga miskin yang kesulitan mendapatkan dukungan kredit dari lembaga keuangan formal.

Perbankan syariah juga merupakan lembaga penting dalam mengimplementasikan financial inclusion di Indonesia. Jika kita flashback ke 2008, jumlah pemain industri perbankan syariah saat itu masih berjumlah 155, yaitu 3 Bank Umum Syariah (BUS), 28 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 124 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Kini jumlah itu semakin meningkat seiring bertambahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk-produk keuangan non-bunga. Pada Desember 2013 saja Indonesia telah memiliki 11 Bank Umum Syariah (BUS), 23 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 16 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Ini merupakan bukti konkrit bahwa perbankan syariah mampu bertahan dan tumbuh meskipun di tengah instabilitas ekonomi, seperti krisis 1998, 2008 dan krisis yang melanda Eropa 2011 silam. Perkembangan secara kuantitas ini sudah tersebar dari pusat hingga ke daerah sehingga bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Keberadaan perbankan syariah sebagai salah satu bagian penting dari lembaga keuangan formal di negeri ini diharapkan mampu mengimplementasikan financial inclusion.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (*mixed method*) menggunakan strategi eksploratoris sekuensial. John W. Creswell (2009) mengatakan strategi eksploratoris sekuensial melibatkan pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap pertama, yang kemudian diikuti oleh pengumpulan dan analisis data kuantitatif pada tahap kedua berdasarkan hasil-hasil pada tahap pertama.

3. PEMBAHASAN

Perbankan memiliki peran penting dalam pemberian akses kepada unbankable people. sektor perbankan Indonesia mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kantor cabang, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terhimpun, dan kredit yang disalurkan oleh perbankan. Seiring dengan perkembangan sektor perbankan, layanan jasa perbankan juga harus merata di seluruh Indonesia. Layanan perbankan harus menjangkau masyarakat di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Distribusi layanan perbankan ini dapat diukur dengan tingkat financial inclusion, baik di Indonesia secara keseluruhan ataupun per provinsi. Sistem keuangan yang semakin inklusif dapat mengalokasikan sumberdaya yang produktif semakin efisien, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan, mengurangi pertumbuhan penyaluran kredit informal yang bersifat eksploitatif (kredit oleh rentenir).

Sebuah sistem keuangan yang inklusif harus memiliki pengguna sebanyak mungkin, oleh karena itu sistem keuangan yang inklusif harus menjangkau secara luas di antara pengguna. Proporsi dari populasi yang memiliki rekening bank merupakan sebuah ukuran untuk penetrasi perbankan. Data World Bank tahun 2010 menunjukkan bahwa dua pertiga masyarakat Indonesia sudah mempunyai simpanan. Lebih kurang 50 persen memiliki akun di lembaga keuangan formal. Mayoritas menabung di bank dan sangat sedikit yang menabung di koperasi dan lembaga keuangan mikro. Lebih kurang 18 persen punya simpanan di tempat lain seperti arisan dan lain-lain.

Ascarya (2007) mengatakan menabung di bank syariah bisa menjadi salah satu langkah perencanaan di masa depan. Produk-produk pendanaan/saving bank syariah ditujukan untuk memobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena Islam secara tegas mengutuk penimbun tabungan dan menuntut penggunaan dana secara produktif dalam rangka

mencapai tujuan sosial ekonomi Islam. Dalam hal ini, bank syariah melakukan tidak dengan prinsip bunga (riba), melainkan dengan prinsip yang sesuai dengan ajaran syariat Islam, terutama wadi'ah, qard, mudarabah, dan ijarah.

Komposisi Dana Pihak Ketiga (DPK) bank syariah di Indonesia berkembang pesat seiring dengan perkembangan bank syariah di Indonesia. Perkembangan signifikan pada DPK ini bisa juga dilihat secara BSM mengalami pertumbuhan DPK mencapai hampir 50% mulai tahun 2010 sampai 2014, BSM juga menguasai hampir 40% dari pangsa pasar DPK perbankan syariah Indonesia. Secara lebih rinci terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah Mandiri (BSM) 2010-2014

Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014
BSM	29.000	42.620	47.410	56.461	59.821
Pertumbuhan (%)	49,95	46,97	11,24	19,09	5,95
Perbankan Syariah Nasional*	76.036	115.415	147.512	176.292	217.858
Pertumbuhan (%)	45,46	51,79	27,81	19,51	18,70
Pangsa	38,13	36,93	32,14	32,03	27,46

Keterangan

*) Terdiri atas BUS dan UUS

Pangsa adalah DPK Bank Syariah Mandiri (BSM) dibanding DPK Perbankan Syariah

Miliar Rupiah (*in Billion IDR*)

Bank syariah Bukopin (BSB) sebagai salah satu bagian dari bank umum syariah juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. BSB telah mengalami perkembangan pesat, salah satunya adalah pada Dana pihak ketiga (DPK). Penghimpunan DPK BSB tumbuh dari Rp 3,27 triliun pada 2013 menjadi Rp 3,99 triliun pada 2014. Sampai akhir 2013 naik sebesar Rp421,48 miliar atau tumbuh sebesar 14,78%, menjadi sebesar Rp3,27 triliun pada 2013 dari Rp2,85 triliun pada 2012. Pertumbuhan DPK BSB pada 2010 sampai 2014 rata-rata 26% bahkan lebih per tahun. Pertumbuhan DPK yang dihimpun BSB trennya positif dengan kenaikan secara nominal yang cukup signifikan. Secara lebih inci bisa terlihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 6. Perkembangan Pembiayaan BRI syariah 2010-2014

Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014
BRI Syariah	5.527,08	9.170,30	11.403	14.167,36	15.691,43
Pertumbuhan (%)	112,57	65,92	24,35	24,24	10,76
Perbankan	68.181	102.655	147.505	180.833	199.330
Syariah Nasional*	45,42	50,56	43,69	22,59	8,26
Pertumbuhan (%) Pangsa	8,1	8,9	7,7	7,8	7,9

Keterangan

*) Terdiri atas BUS dan UUS

Pangsa adalah Pembiayaan BRI syariah dibanding Pembiayaan Perbankan Syariah

Pembiayaan di perbankan syariah menggunakan akad *mudharabah*, akad *musharakah*, akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istisna*, akad *ijarah*, akad *qard*, dan akad lainnya. Data statistic Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2015) mencatat total pembiayaan selalu mengalami peningkatan setiap tahun, yaitu 50,56 persen tahun 2011, 43,69 persen tahun 2012, 24,82 persen tahun 2013, 7,17 persen tahun 2014, dan 0,69 persen terhitung maret tahun 2015. Memang pada maret 2015 ini peningkatan komposisi pembiayaan perbankan syariah tergolong kecil diakibatkan melemahnya ekonomi nasional. Secara spesifik perkembangan *financing* perbankan syariah bisa terlihat pada beberapa Bank Umum Syariah berikut. Pembiayaan BSM tumbuh signifikan pada lima tahun terakhir yaitu 2010-2015. Tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 44,39%, tahun 2011 naik 53,23%, tahun 2012 mengalami kenaikan 21,84, dan tahun 2013 naik 12,76%, tahun 2014 memang sedikit mengalami pertumbuhan negatif sebesar 2,6% disebabkan karena perlambatan ekonomi global. BSM menguasai pembiayaan dengan pangsa rata-rata 30,76 persen dibanding pembiayaan perbankan syariah nasional. Secara rinci bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Pada sektor pembiayaan mikro, BSM telah berhasil menyalurkan pembiayaan usaha mikro dan kecil sebesar Rp8,54 triliun atau 99,08% terhadap jumlah penyaluran pembiayaan usaha mikro dan kecil pada 2013 sebesar Rp8,62 triliun. Pembiayaan terhadap sektor usaha mikro dan kecil memiliki makna yang penting bagi BSM dalam kontribusi membangun negeri melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat. Salah satu bentuk pembiayaan pada sektor usaha mikro dan kecil yang telah dilakukan Bank adalah BSM Pembiayaan Warung Mikro.

Bank syariah tidak hanya bergerak sebagai *comercial bank*, tetapi juga *social bank*. Maka bank syariah menyadari peran penting sektor UMKM dalam menyokong

perekonomian nasional. Bank syariah juga memberikan pembiayaan pada sektor UMKM. Bahkan kata Bapak Azhar Syarief (2015), *Learning and Culture Manager* BRI Syariah, pembiayaan mikro merupakan pembiayaan yang memiliki prospek besar sehingga banyak perbankan saat ini melirik sektor ini.

Bank syariah juga mampu menjaga kualitas pembiayaannya, terbukti sejak 2010 *Non Performing Financing* (NPF) nya relatif rendah yaitu 3,02% tahun 2010, 2,52% tahun 2011, 2,22% tahun 2012, 2,62% tahun 2013, 4,33% tahun 2014, dan 4,81% per maret 2015. Ini relatif rendah dibandingkan NPL perbankan nasional. Posisi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) perbankan syariah sangat baik, yaitu 89,67% tahun 2010, 88,94% tahun 2011, 100,00% tahun 2012, 10,32% tahun 2013, 91,50% tahun 2014, dan 94,24% per maret 2015. Bank syariah mampu menjaga level FDR pada rentang 78% sampai 100% sebagaimana yang diharapkan regulator BI. Hal ini membuktikan bahwa bank syariah mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediari dengan baik. Dana pihak Ketiga (DPK) tidak dibiarkan *idle*, tetapi benar-benar disalurkan pada sektor riil. BOPO atau perbandingan beban operasional terhadap pendapatan operasional bank syariah memang terbilang masih agak tinggi. Hal ini wajar karena sebagai perbankan yang masih terus berkembang, bank syariah gencar melakukan ekspansi guna pencapaian target bisnis.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis peran perbankan syariah dalam mengimplementasikan *financial inclusion* di Indonesia, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan perbankan syariah terlihat dari peningkatan aset, Dana Pihak Ketiga (DPK) naik 15% sampai 45% per tahun, pembiayaan juga mengalami kenaikan yang signifikan mencapai 50,05% per tahun. Analisis rasio keuangan juga tercatat baik. Rasio pembiayaan terhadap DPK (FDR) perbankan syariah juga sangat baik berada pada batas yang ditetapkan BI yaitu 87%-100%. Kecukupan modal minimum perbankan syariah (CAR) cukup baik yaitu 15% bahkan lebih. Tingkat income yang dihasilkan dari asset dan ekuitas juga cukup baik (ROA/ROE). Angka pembiayaan bermasalah rendah yaitu di bawah 5%, bahkan di pembiayaan mikro bank syariah pernah mencapai NPF 0%. Beban operasional atas pendapatan operasional (BOPO) memang masih tergolong tinggi karena perbankan syariah gencar melakukan ekspansi ke berbagai wilayah di Indonesia. Pertumbuhan yang dialami perbankan syariah ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi riil.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. (2007). *Akad & produk bank syariah*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Basrowi, M., & Suwandi, S. (2008). *Memahami penelitian kualitatif*. Rineka Cipta.
- Chapra, M. U. (2000). *Islam dan pembangunan ekonomi*. Gema Insani Press.
- Chapra, M. U. (2001). *The future of economics: An Islamic perspective*. Gema Insani Press.
- Chaudry, M. S. (2012). *Sistem ekonomi Islam: Prinsip dasar* (S. Rosyidi, Trans.). Kencana.
- Choudhury, M. A. (1986). *Contributions to Islamic economic theory*. St. Martin's Press, Inc.
- Creswell, J. W. (2012). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Pustaka Pelajar.
- Faiz, A., & Noviandi, O. (2009). *Menyongsong sistem ekonomi anti krisis*. Pustaka Thariqul Izzah.
- Kahf, M. (1955). *Ekonomi Islam: Telaah analitik terhadap fungsi sistem ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar.
- Khan, M. A. (1994). *An introduction to Islamic economics*. Percetakan Zafar SDN BHD.
- Maleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT. Remaja Rosdakarya.
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (2008). *Metodologi penelitian survei*. Pustaka LP3ES.
- Sjahdeini, S. R. (2010). *Perbankan syariah: Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*. PT. Jayakarta Agung Offse.